



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI
ATAS**

RUU TENTANG APBN TA 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan Oleh : Willy Aditya, S.Fil., M.D.M.

Nomor Anggota: A - 383

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan Salam Restorasi!!!

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI;

Sdri. Menteri Keuangan beserta jajaran;

Para Anggota DPR RI .

Sebagai pembuka izinkan kami untuk memanjatkan puji syukur yang tiada terkira atas rahmat dan Karunia Allah SWT sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas RUU Tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami Fraksi Partai NasDem mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan momentum proklamasi ini semangat pantang menyerah terus tumbuh dalam sanubari setiap anak bangsa sehingga masa depan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera dapat kita rengkuh.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

Tahun 2022 adalah momentum penting bagi masa depan perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita tahu bersama tahun anggaran 2022 adalah periode terakhir kita menikmati kemewahan fiskal dengan relaksasi defisit di atas 3%. Sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2020 pada tahun 2023 defisit APBN akan kembali ke posisi normal. Meskipun dinamika pandemi Covid-19 masih sangat tinggi dan berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, pemerintah dituntut untuk menerapkan mitigasi resiko yang cermat untuk memastikan konsolidasi kebijakan fiskal berjalan secara kuat dan menyeluruh sehingga keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi pemerintah yang mengejawantahkan Konstruksi pemikiran tersebut ke dalam rancangan anggaran dan belanja negara 2022 dengan tema "Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural". Pokok-pokok kebijakan fiskal yang meliputi pemantapan pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial, peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural; serta optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better* telah disusun dengan merupakan cerminan watak APBN kita yang responsive, antisipatif dan dan fleksibel dalam merespon dinamika ketidakpastian ekonomi global dan domestik..

Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem kembali menegaskan pentingnya memaksimalkan keberpihakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan kelas menengah yang selama ini paling merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Data Bank Dunia menyatakan bahwa antara Februari 2020 sampai 2021 menyatakan bahwa jumlah pengangguran meningkat sebesar 1,8 juta dan 2,8 juta jiwa jatuh dibawah garis kemiskinan.

Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta nota keuangan, Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

A. ASUMSI DASAR MAKRO

1. Fraksi Partai NasDem menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,0 sampai 5,5% masih cukup realistis. Angka tersebut bahkan dapat dilampaui jika pemerintah fokus untuk mendorong sektor konsumsi dan investasi dengan mempercepat implementasi UU Cipta kerja. Selama ini lapangan pekerjaan baru lebih banyak berada pada sector dengan produktivitas yang rendah dan pendapatan yang tidak cukup untuk mengangkat status mereka menjadi kelas menengah. Berdasarkan data bank Dunia diantara 85 juta pekerja berbayar di Indonesia hanya 13 juta atau 15% yang termasuk dalam kelas menengah. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi tersebut dimana postur kelas menengah Indonesia menurun sebesar 5,2%.

Akselerasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan termasuk menjaga daya beli kelas pekerja yang terkena PHK melalui jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

2. Target inflasi sebesar 3% dianggap cukup rasional. Pemerintah diharapkan pemerintah terus menerus melakukan pengawasan atas rantai pasok bahan pangan di daerah.. Ketersediaan supply barang di daerah terutama bahan pokok tetap harus tetap terjaga seiring dengan proyeksi kenaikan tingkat permintaan akibat membaiknya daya beli msayarakat.

Menko
Perekonomian
BI
BKF
DJA (SD 1)

3. Target Nilai tukar pada kisaran Rp14.350 dianggap masih cukup moderat di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi pasar keuangan domestic. Namun demikian, Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Neraca perdagangan Indonesia Juni 2021 kembali surplus sebesar 1,32 miliar dolar AS, meskipun sedikit menurun dibandingkan

BI
BPS
BKF
DJA (SD 1)

dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 2,7 miliar dolar. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem mendorong mempertahankan surplus neraca perdagangan dalam mendukung penguatan kurs rupiah. Oleh karena itu trend penguatan masih cukup terbuka di tahun 2022 karena dampak pandemic diprediksi akan berkurang dan harga komoditas mulai stabil di pasar internasional.

4. Fraksi Partai Nasdem menganggap bahwa target tingkat bunga SUN sebesar 6,32-6,72% berada pada level yang moderat. Proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang mempengaruhi sentimen pasar tidak dapat kita hindari. Fraksi Partai NasDem mendorong agar pemerintah mengantisipasi lonjakan tingkat suku bunga SBN akibat potensi *capital outflow effect* jika the Fed benar-benar melakukan tapering off. Langkah Pembelian SUN oleh Bank Indonesia di pasar primer seperti yang terjadi pada tahun 2020 sebaiknya dihindari karena pada tahun 2022 daya beli masyarakat kemungkinan akan kembali normal sehingga dapat meningkatkan inflasi.
5. Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa target lifting minyak 703 ribu Barrel per Hari cukup realistis mengingat beratnya permasalahan struktural yang kita hadapi berupa penurunan alamiah sumber produksi utama dan pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan mengantisipasi penurunan harga minyak internasional agar tetap menggairahkan aktivitas hulu migas. Fraksi Partai NasDem juga beranggapan bahwa masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan aktivitas hulu migas mengingat Indonesia telah memiliki *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang didesain untuk menarik investasi sehingga dapat mendorong adanya eksplorasi sumber produksi migas baru.

BI
DJPPR
DJA (SD 1, SD 5)

Kemen ESDM
BP Migas
DJA (SD 1)

B. Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal

1. Fraksi Partai NasDem menganggap bahwa target pendapatan negara tahun 2022 sebesar Rp. 1.840,7 masih cukup moderat.. Fraksi Partai NasDem mendorong pemerintah untuk menggali sumber alternatif untuk meningkatkan rasio pajak terutama perbaikan regulasi hukum untuk mengatasi kebocoran pajak pada sector-sektor tertentu sehingga resiko shortfall penerimaan pajak dapat diminimalisir.
2. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menerus melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perencanaan dan

DJP
BKF
DJA (SD 1)

penganggaran Belanja. Target pemerintah Rp 2.631,8 triliun - Rp 2.775,3 triliun dianggap sangat realistis mengingat terbatasnya ruang fiskal yang kita miliki.

Bappenas
BKF
DJA (SD 2, SD 3)

Rendahnya penerimaan negara dan besarnya *mandatory spending* yang relatif cukup besar mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih optimal dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 masih membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Fraksi Partai NasDem memberikan catatan terkait masih rendahnya penyerapan anggaran TKDD di daerah setelah *refocussing*. Selain itu Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun atau setara 9,4% dari APBD. Di sisi lain Simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp 182,33 triliun atau membengkak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu melakukan pemetaan yang intensif atas kendala teknis ataupun substantif yang terjadi di lapangan sehingga belanja daerah dapat dipercepat terutama belanja untuk penanganan covid -19.

Kemendagri
BKF
DJPk
DJA (SD 4)

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

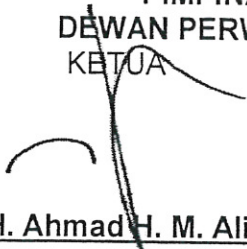
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU APBN TA 2022 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita sekalian. Atas perhatian bapak/ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

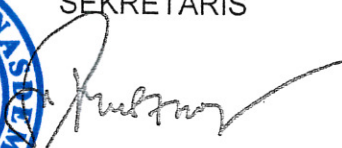
Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Swastiastu,
Namo Budaya
Salam Restorasi

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA SEKRETARIS


H. Ahmad H. M. Ali, SE
Nomor Anggota: A - 395




Saan Mustopa
Nomor Anggota: A - 367